

## RINGKASAN

Ibrahim Imron, 2014. **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)”**. Dr. Mohammad Saleh Soeaidy, MA, Drs. Heru Ribawanto, MS. 95 Hal + xii.

---

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*). Ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara yaitu, pertumbuhan, *welfare state*, neo ekonomi, *structuralize* dan *humanizing*. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu: (1) pertumbuhan (2) kesejahteraan dan (3) *people centered*. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma *“people centered development”*. Paradigma pembangunan berwawasan manusia mempunyai arti bahwa manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan dan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu : kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Namun demikian, akibat telah termarginalisasi dalam waktu yang lama, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan otonominya sebagai pelaku utama dari pembangunan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam strategi pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat, disamping itu juga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program asistensi kesejahteraan sosial keluarga. Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dan jaminan sosial dengan melibatkan pendampingan sosial.

Sedangkan dalam perkembangannya Kementerian Sosial melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) sebagai tindak lanjut dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) atau program KUBE ini, dimana program ini ditujukan untuk KUBE tumbuh yang pernah di bentuk atau diberdayakan oleh dinas sosial provinsi maupun kab/kota. Program yang memberikan bantuan berupa uang sebesar 30.000.000 rupiah untuk masing-masing kelompok usaha bersama yang disalurkan melalui perbankan.

Pada tahun 2011, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusomo, Kabupaten Malang menjadi sasaran dari Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang berasal dari Kementerian Sosial ini. Program BLPS yang di berikan kepada 10 Kelompok Usaha Bersama yang terpilih dari 30 kelompok usaha bersama yang telah terbentuk pada saat Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) tahun 2009 ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terarah pada kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Produktifnya (UEP) dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam menguatkan kelembagaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara beserta instrumennya. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu fakta empiris di lapangan, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di ketahui bahwa jenis kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama di desa dawuhan adalah peternakan sapi yang sifatnya usaha sampingan karena pekerjaan mayoritas masyarakat adalah buruh tani, sementara untuk perawatan dan pengembangbiakkannya dilakukan secara terpisah atau belum ada fasilitas untuk perawatan secara berkelompok, untuk pemasaran hasil produksi belum terorganisir dengan baik. Untuk penguatan kelembagaan yaitu dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok, disamping itu, berkaitan dengan interaksi antar anggota dan pengurus di temui banyak permasalahan dimana permasalahan tersebut mempengaruhi dinamika perkembangan kelompok sedangkan dalam administrasi keuangan sudah bersifat transparan dan mempunyai akuntabilitas seperti Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan buku tabungan anggota serta buku laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Saran yang dapat diberikan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama adalah memperbaiki sistem perawatan dan pengembangbiakan serta pemasaran hasil produksi, sementara untuk kelembagaannya adalah membuat unit pengelola keuangan kelompok sebagai sarana pengembangan modal usaha sehingga bisa digunakan untuk memvariasikan jenis usaha.

**Kata Kunci** : Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan dan Pembangunan

## SUMMARY

Ibrahim Imron, 2014. "**Community Empowerment Through Business Group (Case Study On The Village Dawuhan, Poncokusumo District, Malang Regency)**". Dr.. Mohammad Saleh Soeaidy, MA, Drs. Heru Ribawanto, MS, 95 It + xii.

---

The importance of placing people as the main actors in development in Indonesia shows change in the development paradigm of growth (*growth approach*) to independence (self-reliance approach). There are five paradigms underlying the implementation process of development in a country, namely growth, welfare state, neo economics, structuralize and humanizing. However, this is only the fifth paradigm to move in three dimensions : growth, welfare and people centered. One of the development paradigm that is still popular as a benchmark of development in most developing countries, including Indonesia, is the paradigm of "people centered development". *Human-oriented* development paradigm means that the man (*of the people*) is the ultimate goal of development and human capacity is the most critical resource. It can be concluded that this approach puts human beings as subjects of development and emphasizes the importance of empowerment man: man's ability to actualize its potential. However, the result has been marginalized for a long time, people have difficulty in articulating their autonomy as the main actors of development. In this context, empowerment based on *People Centered Development* approach is needed in the community development strategy.

Therefore, the Ministry of Social implement some populist economic strengthening programs with strategies to encourage *self-reliance* efforts of community groups, as it also as part of efforts to reduce poverty. The realization of this activity is the development of Business Groups (KUBE) which is a still family of social welfare assistance programs. This event is a community development program for poverty reduction through assistance and social security by involving social assistance.

Meanwhile, the Ministry of Social development through the Director General of Social Empowerment issued a Social Empowerment Direct Assistance program (BLPS) as a follow-up of the Poor Empowerment Program (P2FM) or the KUBE program, where the program is aimed at KUBE transform and grow ever in shape or empowered by social services provincial and district/town. Programs that provide assistance in the form of money amounting to 30 million rupiahs for each of the business groups are channeled through banks.

In 2011, the Village Dawuhan, Poncokusumo subdistrict, Malang regency became the target of Direct Assistance Program Social Empowerment (BLPS) from the Ministry of Social Affairs. BLPS program that is provided to 10 selected Business Group of 30 business groups that have been formed during the Poor People's Empowerment Program (P2FM) in 2009 aims to increase the Productive

Economic Business (UEP) and the strengthening of the institutional Business Group.

The method used in this research is descriptive qualitative approach. The focus of the research focused on the activities of Group Joint Economic Enterprises in increasing productive (UEP) and Joint Business Group activities in strengthening institutions. Data collection techniques using observation, documentation, and interviews and instruments. The data were analyzed inductively, ie the empirical facts on the ground, with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and then drawing conclusions.

Based on the results and discussion to know that kind of productive economic activities with business groups in the village is a cattle farm which still nature sideline because the vast majority of jobs are agricultural farm laborers, while for the care and breeding done separately because no facilities for treatment in groups, for marketing products still have not been well organized. For institutional strengthening, namely by increasing the intensity and leadership coaching group meetings, in addition, with regard to the interaction between members and administrators in encounter has found so many problems where the problems affecting the dynamics of the groups. While in financial administration has been transparent and accountable as Social Solidarity Contribution (IKS) they also have passbook member and accountability report book.

Advice can be given to an increase in productive economic activities with business groups is to improve the care system and the breeding and marketing of products, while for institutional financial manager is to make unit groups as a means of development capital that can be used to vary the type of business.

**Keywords:** Business Groups, Empowerment and Development

